

DAFTAR INVENTARISASI MOU ANTARA KPU DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	TENTANG	RUANG LINGKUP	TEMPAT	AKTIF	JANGKA WAKTU	JENIS
1	Universitas Indonesia	Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pengembangan SDM dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	<p>a. Pemberdayaan bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi strategis untuk meningkatkan kinerja PARA PIHAK;</p> <p>b. Peningkatan kemampuan sumber daya dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang sitem Pemilihan Umum;</p> <p>c. Sosialisasi dan pemasyarakatan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;</p> <p>d. Penggalangan kerjasama dengan badan-badan lainnya dalam rangka pemanfaatan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang sistem Pemilihan Umum;</p> <p>e. Kegiatan kajian dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>f. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disetujui bersama oleh PARA PIHAK.</p>	Kantor KPU	24/01/2018	4 Tahun	Dalam Negeri
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Manajemen dan Pengawasan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018	<p>a. Koordinasi manajemen dan pengawasan konten internet dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;</p> <p>b. Pertukaran data dan informasi konten internet; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet;</p> <p>c. Pemantauan pada konten internet yang terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;</p> <p>d. Peningkatan sosialisasi dan edukasi dalam manajemen dan pengawasan penggunaan internet terkait materi kampanye sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;</p> <p>e. Penguatan partisipasi publik dalam penggunaan internet dan manajemen konten internet; dan</p> <p>f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.</p>	Jakarta	31/01/2018	1 Tahun	Dalam Negeri

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	TENTANG	RUANG LINGKUP	TEMPAT	AKTIF	JANGKA WAKTU	JENIS
3	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah; c. Sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya; d. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; e. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing; dan f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 	Jakarta	5/03/2018	3 Tahun	Dalam Negeri
4	Universitas Sumatera Utara	Pendidikan dan Pelatihan SDM KPU	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Pasca Sarjana Tata Kelola Pemilihan Umum; b. Pelatihan, Penelitian, dan Penerbitan di Bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. 	Kantor KPU	27/03/2018	3 Tahun	Dalam Negeri
5	Pemerintah Kota Yogyakarta	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan ruangan beserta infrastruktur pendukung di Taman Pintar Kota Yogyakarta; b. Pemasangan alat peraga dalam bentuk Rumah Pintar Pemilu Nasional; c. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. 	Taman Pintar Kota Yogyakarta	2/05/2018	1 Tahun	Dalam Negeri
6	PT. POS Indonesia (PERSERO)	Distribusi Logistik Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan layanan jasa logistik PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA untuk distribusi logistik Pemilihan Umum; b. Pemanfaatan aset (gudang) PIHAK KESATU untuk penyimpanan barang PIHAK KEDUA; dan c. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. 	Kantor KPU	30/05/2018	1 Tahun	Dalam Negeri
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender; b. Fasilitasi persiapan penerapan perencanaan penganggaran responsif gender; c. Fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi atau kebijakan Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender; d. Sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan; e. Fasilitasi penyediaan Data Terpilah berkaitan dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada Pemilu, dan Pemilihan; dan f. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender. 	Kantor KPU	30/05/2018	4 Tahun	Dalam Negeri

NO.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	TENTANG	RUANG LINGKUP	TEMPAT	AKTIF	JANGKA WAKTU	JENIS
8	Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Persiapan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019	<p>a. Menyusun kriteria standar kemampuan dan juknis pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019;</p> <p>b. Merekomendasikan rumah sakit tempat pelaksanaan kesehatan;</p> <p>c. Membantu KPU untuk menjamin pelaksanaan pemeriksaan kesehatan didasarkan pada juknis dan independensi rumah sakit beserta tim pemeriksanya; dan</p> <p>d. Melakukan pendampingan pada saat pemeriksaan kesehatan.</p>	Jakarta	25/07/2018	berlaku s.d. berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	Dalam Negeri
9	Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU)	Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	<p>a. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) Layanan Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;</p> <p>b. Pertukaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan tetap mengikuti prosedur pengecualian yang ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan perundang-undangan. (Informasi yang dikecualikan akan dilanjut pembahasan tanggal 10 Juli 2018);</p> <p>c. Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>d. Membangun sinergitas Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;</p> <p>e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.</p>	Jakarta	21/08/2018	3 Tahun	Dalam Negeri
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Pemenuhan Hak Pilih bagi Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	<p>a. Pertukaran data informasi;</p> <p>b. Penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis; Peningkatan kapasitas bagi Petugas Pemasyarakatan;</p> <p>c. Edukasi dan Sosialisasi bagi Tahanan dan Narapidana;</p> <p>d. Penelitian atau Riset;</p> <p>e. Pengembangan Sistem teknologi informasi; dan/atau</p> <p>f. Kerjasama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.</p>	Jakarta	31/07/2018	5 Tahun	Dalam Negeri

